



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 07/BAWASLU PROV.JT-07/HK.01.01/IV/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00.III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Tanggal 26 Maret 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 11.BA/BAWASLU PROV.JT-07/HK.01.00/IV/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina dan Pengarah PPID :
    - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
    - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
    - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
  - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    - 3. Pemberian tanggapan atas kebaratan Permohonan Informasi;
    - 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
    - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik;

c. Atasan PPID bertugas :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP);
4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan Memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP);
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Pelayanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
2. Menginventarisir kebutuhan pelayanan Informasi Publik, baik softfile maupun hardfile sesuai dengan Daftar Informasi Publik (DIP);

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : CILACAP  
Pada Tanggal : 6 April 2020



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
Nomor : 07/Bawaslu Prov.JT-07/HK.01.01/IV/2020  
Tanggal : 6 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	BACHTIAR HASTIYARTO, SH.,MH.	Ketua	Pembina
2.	WARSID, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	MIFTAH NURYANTO, SH.		
4.	UMI FADILAH, S.Ag.,M.Si.		
5.	ERINA HASTUTI, SS.,M.Pd.		
6.	CHANDRA HARTANTO, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	ETI PURWANTI	BPP	PPID
8.	BANGUN PRIYANTOSO, S.H.	Staff Divisi SDM, Organisasi dan DATIN	Petugas Pelayanan Informasi
9.	MUHAMMAD ABDUL FATTAH, S.Kom.	Staf Divisi Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
10.	ARDIA NUR ALI MADE S., S.Kom.	Staf Divisi Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
11.	LUKMAN NUR HAKIM, S.H.,M.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
12.	JOKO WALUYO, S.Sos.,M.H.	Staf Divisi Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13.	PRIMA HUTAMA PARISTYA. S.H	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : CILACAP  
Pada Tanggal : 6 April 2020

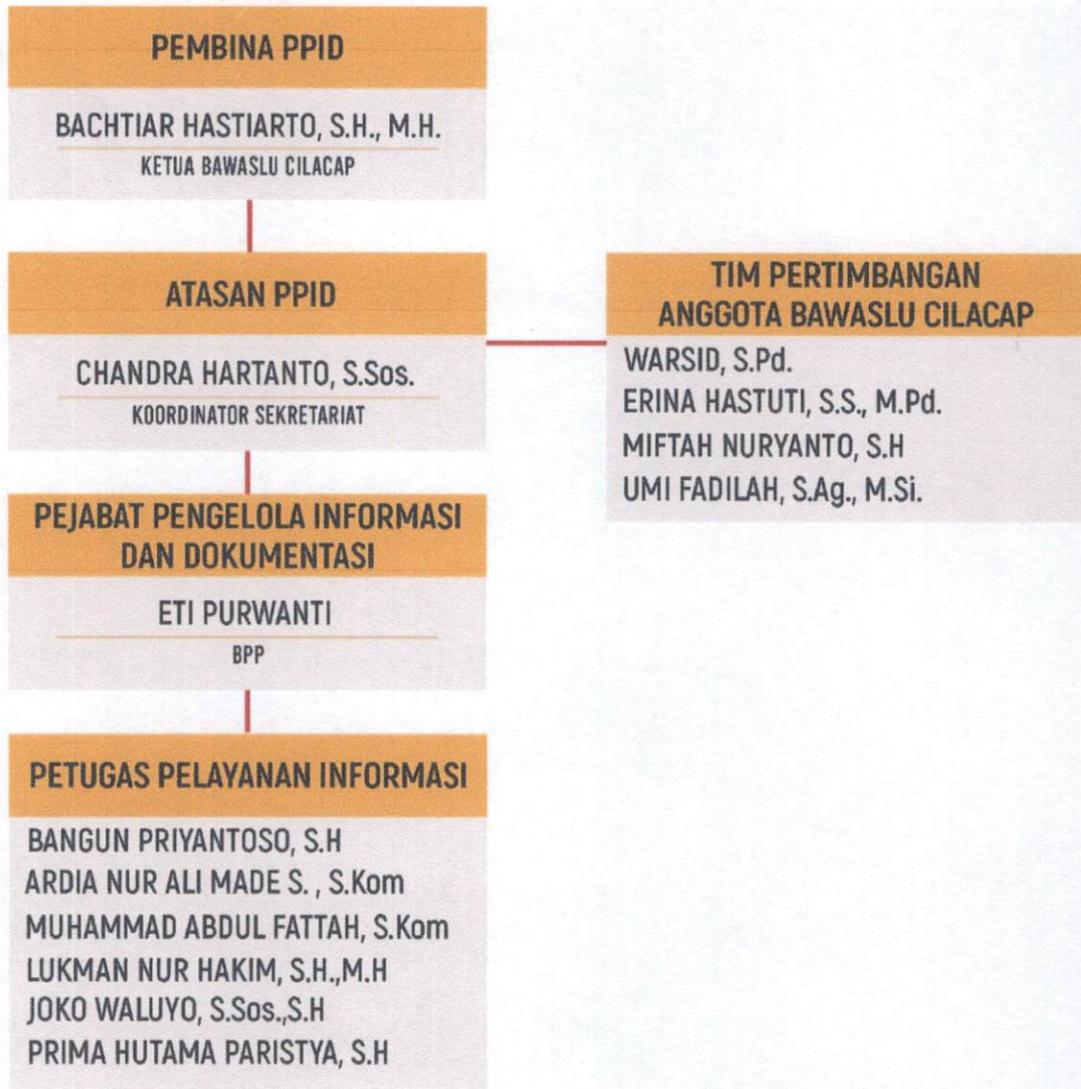
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**



**BACHTIAR HASTIARTO, S.H.,M.H.**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP  
Nomor : 07/Bawaslu Prov.JT-07/HK.01.01/IV/2020  
Tanggal : 6 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN CILACAP**



Ditetapkan di : CILACAP  
Pada Tanggal : 6 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**



**BACHTIAR HASTIARTO, S.H.,M.H.**